

MENATA KELOLA KELEMBAGAAN PKL BERDASARKAN HUBUNGAN ANTAR STAKEHOLDER

Elisabeth Ratu Rante Allo, Auderey Tangkudung dan Adipati Rahmat Gumelar

Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat, Indonesia

Email: elisabethratu@gmail.com, audreygdt2018@gmail.com dan adipatirahmat@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
Diterima 2 Januari 2020 Diterima dalam bentuk revisi 10 Januari 2020 Diterima dalam bentuk revisi 15 Januari 2020	<i>This article discusses efforts to establish institutional governance for street vendors in Barito Street, Kebayoran Baru Subdistrict, South Jakarta Municipality, DKI Jakarta Province. This study was conducted by analyzing the relationship between stakeholders who have an interest in the existence of street vendors, using actor network theory approach and UCINET software assistance. This study found that street vendors are stakeholders who have the highest close relationship compared to all other stakeholders. However, with the position of street vendors as the object of policy, the stakeholders with the second highest proximity, namely the cooperative and MSME office of DKI Jakarta city, must occupy a central position as a bridge between the government and street vendors, with partners and other related parties. This study is useful in efforts to empower street vendors in urban areas.</i>
Keywords: PKL; stakeholder; actor network theory; UCINET	
Kata kunci: PKL; pemangku kepentingan; teori jaringan aktor; UCINET	ABSTRAK Artikel ini mendiskusikan upaya membentuk tata kelola kelembagaan bagi para pedagang kaki lima di jalan barito, kecamatan kebayoran baru, kotamadya jakarta selatan, provinsi DKI jakarta. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis hubungan antar <i>stakeholder</i> yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan PKL di jalan barito tersebut, dengan menggunakan pendekatan <i>actor network theory</i> dan bantuan perangkat lunak UCINET. Kajian ini menemukan bahwa PKL merupakan stakeholder yang memiliki hubungan kedekatan yang paling tinggi dibandingkan seluruh stakeholder lainnya. Namun dengan posisi PKL sebagai objek kebijakan, maka <i>stakeholder</i> dengan kedekatan tertinggi kedua, yaitu dinas koperasi dan UMKM kota DKI jakarta, harus menempati posisi sentral sebagai jembatan antara pemerintah dengan PKL, dengan mitra dan pihak terkait lainnya. Kajian ini bermanfaat dalam upaya pemberdayaan PKL di kawasan perkotaan.

Pendahuluan

Pedagang kaki lima atau PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak,

menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap (Rosita & Kurniati, 2006). PKL tumbuh begitu cepat karena

adanya permintaan dari para calon konsumen yang umumnya merupakan pejalan kaki dan juga didorong oleh kesempatan yang tercipta pada ruang-ruang publik yang dekat dengan keberadaan para konsumennya (Yatmo, 2008).

PKL pada dasarnya merupakan kegiatan usaha sektor informal, sehingga keberadaannya berada diluar sistem perencanaan perkotaan yang umum. Posisi tersebut menjadikan keberadaan PKL pada umumnya tidak tertata, tidak higienis, tidak estetis, dan rawan premanisme (Ko Ko Et Al., 2020). Sebagai akibatnya pemerintah kota DKI Jakarta menjadi terpaksa harus melakukan penertiban sebagai jalan untuk mengembalikan fungsi ruang-ruang publik tersebut kepada fungsi awalnya (Rahardyan, Aziz & Fitriani, 2019).

Sebagai sebuah pedagang yang bergerak pada sektor informal. Satu orang PKL pada umumnya hanya merupakan pekerja ekonomi skala mikro, namun dalam satu titik areal publik, pada umumnya dapat ada hingga belasan hingga puluhan PKL yang saling berhubungan. Misalnya PKL makanan dengan PKL minuman yang secara kasar sudah dapat menjadi satu kelompok pujasera di sebuah pertokoan. Hubungan antar PKL yang dapat memutar uang dalam nilai yang sangat besar ini, selalu menarik perhatian banyak pihak dengan kepentingan masing-masing.

Para pihak yang memiliki kepentingan atau *stakeholder* ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, pedagang formal, pemilik lahan, hingga PKL itu sendiri. Mereka ini merupakan para *stakeholder* yang berperan terlibat dalam kehidupan PKL di ruang-ruang publik DKI Jakarta.

(Debrah, 2007), menyatakan bahwa PKL sebagai pekerja yang bergerak pada sektor informal seharusnya mendapat pemberdayaan dari pemerintah. Sehingga PKL dapat lebih sejahtera agar mampu

bertransformasi kepada pedagang formal yang tercatat dalam roda ekonomi sebuah kota. Pemberdayaan dari pemerintah daerah juga sepatutnya diberikan kepada PKL karena mereka berkontribusi kepada penerimaan pajak secara tidak langsung melalui jual beli barang dan jasa serta menyerap tenaga kerja.

(Walsh, 2010) juga mengingatkan bahwa pemberdayaan tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui penciptaan dan atau pembenahan tata lembaga sektor informal PKL kedalam sistem yang lebih baku. Dengan tujuan agar PKL dapat lebih mudah dikendalikan, diawasi, dan dibina kepada bagian dari sistem perdagangan kota itu sendiri (Economy, 2019)

Namun dengan begitu banyaknya stakeholder yang memiliki peran masing-masing dalam pergerakan PKL di kota DKI Jakarta, maka upaya pemberdayaan PKL menjadi sulit karena seluruh pihak merasa memiliki kepentingan dan bersaing dalam mempertahankan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu perlu dibangun suatu tata kelola koordinasi antar *stakeholder* yang jelas untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

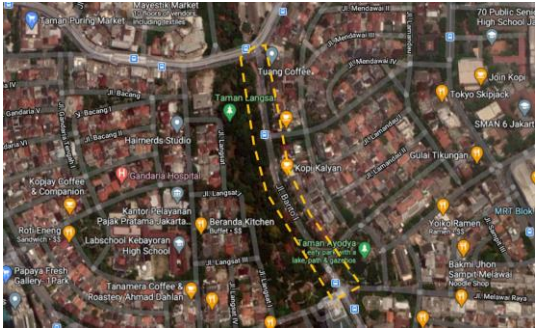
Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, namun metode penelitian yang digunakan merupakan metode campuran antara metode kuantitatif dengan kualitatif. Peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak sebagai mekanisme olah data hasil diskusi dan perhitungan rumus matematika juga akan digunakan, yaitu perangkat lunak UCINET 64 untuk menganalisis hubungan antar stakeholder dan juga perangkat lunak netdraw untuk memetakan jaringan *stakeholder*.

Software UCINET versi windows 64, yang merupakan perangkat lunak untuk menganalisis data jaringan sosial. Perangkat lunak UCINET ini digunakan untuk menganalisis hubungan antar *stakeholder*, dan

dapat diunduh secara gratis pada tautan berikut ini: <https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home>. software netdraw, merupakan program berbasis windows untuk memvisualisasikan data jaringan sosial. Perangkat lunak netdraw ini digunakan untuk membuat visualisasi jejaring antar *stakeholder* PKL di jalan barito 1, dan dapat diunduh secara gratis pada tautan berikut ini: <https://sites.google.com/site/netdrawsoftware/home>.

Wilayah kajian dari penelitian ini adalah areal PKL di sepanjang jalan barito I, kecamatan kebayoran baru, kotamadya jakarta selatan, provinsi DKI jakarta. Areal PKL ini dipilih sebagai wilayah kajian karena memiliki rekam permasalahan yang jelas dan juga keberadaan peran para *stakeholder* dalam keberadaan PKL di jalan barito 1.



Gambar 1. wilayah kajian di jalan barito 1, kecamatan kebayoran baru, kotamadya jakarta selatan

Hasil dan Pembahasan

Analisis peran para *stakeholder* dalam kajian ini, dibutuhkan untuk mengetahui peran seluruh *stakeholder* yang memiliki kepentingan dengan aktivitas PKL di jalan barito 1. Dari tingkat terkecil yaitu individu, hingga tingkat tertinggi yang berada di tangan pemerintah pusat. Upaya menganalisis hubungan antara *stakeholder* dilakukan dengan pendekatan *Actor Network Theory* (ANT).

ANT merupakan suatu konsep yang melihat para *stakeholder* sebagai suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain, dan tidak berdiri sendiri-sendiri (Latour,

1996). Analisis hubungan antara *stakeholder* dengan pendekatan ANT perlu dilakukan dengan identifikasi para *stakeholder*, melakukan analisis hubungan antar *stakeholder*, dan melakukan analisis masing-masing *stakeholder*. Pelaksanaan setiap tahapan disampaikan sebagai berikut.

1. Identifikasi Stakeholder PKL di Jalan Barito 1

Identifikasi *stakeholder* merupakan proses identifikasi individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi, atau merasa dirinya dipengaruhi oleh keputusan atau aktivitas *stakeholder* lain (Latour, 1996). Identifikasi *stakeholder* dalam jaringan keberadaan PKL di jalan barito 1 dilakukan melalui diskusi dengan para *stakeholder* ataupun melalui kajian literatur, sehingga diperoleh hasil identifikasi sebagai berikut.

Tabel 1
identifikasi stakeholder terkait dalam jaringan PKL di jalan barito 1

No.	Stakeholder terkait	Kepentingan yang dimiliki
1	Kementerian	Memfasilitasi PKL untuk dapat perdagangan
2	Kementerian koperasi dan UMKM	Melindungi PKL sebagai usaha mikro yang menciptakan ekonomi informal.
3	Kementerian tenaga kerja	Mendorong PKL sebagai penyerap tenaga kerja.
4	Dinas koperasi dan UMKM	Memberdayakan PKL sebagai sektor usaha informal yang menggerakkan ekonomi perkotaan.
5	Dinas tata kota	
6	Pedagang kaki lima	Menjalankan usaha sebagai bentuk mata pencaharian.
7	Organisasi kemasyarakatan	Memanfaatkan keberadaan PKL sebagai objek untuk menarik uang layanan keamanan.
8	Pedagang formal	Menjalankan usaha sebagai bentuk mata pencaharian, yang seringkali terganggu atau bersaing dengan keberadaan PKL.
9	Pemilik lahan	Menjaga keberadaan lahan terbuka untuk tetap sesuai dengan fungsinya.
10	Polisi pamong praja	Menjaga keamanan dan ketertiban ruang publik.
11	Konsumen	Memperoleh layanan jasa ataupun barang dari PKL

Sebagaimana terlihat dalam tabel 1, setiap *stakeholder* yang ada dalam jaringan tidaklah berdiri sendiri, tetapi juga memiliki hubungan dengan *stakeholder-stakeholder* yang lain, baik dalam bentuk koordinasi, pelayanan, dan produsen-konsumen. Namun diketahui bahwa beberapa *stakeholder* yang seharusnya saling berhubungan ternyata tidak memiliki jalur koordinasi yang jelas.

Sebagai contoh adalah koordinasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah, dimana sebenarnya keberadaan PKL dapat dilihat sebagai suatu bentuk ketidak tertataan ruang publik. Keberadaan PKL telah mengurangi kenyamanan pejalan kaki, menghilangkan keberadaan fasilitas umum, membuat ruang publik menjadi terkesan kotor, tidak higienis, dan semrawut. Namun PKL juga merupakan salah satu bentuk wujud ekonomi informal yang memutarakan uang dalam jumlah besar dan menyerap tenaga kerja. Sehingga dari sisi pemerintah pusat seperti kementerian perdagangan, kementerian koperasi dan UMKM, serta kementerian tenaga kerja, keberadaan PKL sangat menguntungkan mereka, namun menjadi beban bagi pemerintah kota DKI Jakarta yang harus menyelesaikan dampak negatif dari keberadaan PKL tersebut.

Hal ini kemudian menimbulkan kendala ketika masing-masing *stakeholder* memiliki kepentingannya sendiri-sendiri dan saling berupaya melindungi kepentingan masing-masing. Pihak pemerintah pusat pada berbagai kementerian memberikan program yang mendukung keberadaan PKL, sementara permasalahan utama yaitu dampak negatif PKL pada ruang publik DKI Jakarta seringkali diabaikan.

2. Perlibatan Stakeholder

Melalui pendekatan *Actor Network Theory* (ANT), (Missonier & Loufrani-

Fedida, 2014) menyarankan agar seluruh *stakeholder* dilibatkan kedalam suatu upaya perumusan solusi bersama. Upaya ini harus dibangun dengan lebih dahulu menyatukan persepsi mengenai masalah yang dihadapi.

Masalah utama yang dihadapi dari keberadaan PKL adalah dampak negatif yang tercipta atas keberadaan PKL, yang berbandingkan dengan dampak positif yang juga tercipta atas keberadaan PKL. Dalam hal ini kedua dampak bertolak belakang tersebut harus disadari oleh seluruh *stakeholder* dalam jaringan keberadaan PKL.

Dengan bersama-sama dipahaminya dampak positif dan negatif dari keberadaan PKL tersebut, maka seluruh *stakeholder* perlu membangun suatu kesepakatan atas tujuan bersama yang akan dicapai. Dengan adanya tujuan bersama yaitu tata kelola PKL yang menguntungkan semua pihak, maka seluruh pihak sepatutnya berkontribusi kepada pencapaian tujuan tersebut.

3. Kerangka Tata Kelola PKL

Hasil identifikasi *stakeholder* dengan menggunakan pendekatan *Actor Theory Network* setidaknya menjadi gambaran, bahwa hubungan antar *stakeholder* dalam keberadaan PKL di jalan barito 1 belumlah terbentuk. Hubungan antar instansi yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan dan penanganan dampak negatif PKL pun terkesan samar. Sehingga pemerintah DKI Jakarta terkesan seperti bekerja sendirian dalam mengemban tugas tersebut.

Analisis jaringan komunikasi digunakan dalam proses ini karena dapat membantu menganalisis peran dan posisi masing-masing aktor yang terlibat dalam jaringan keberadaan PKL di jalan barito 1. Dalam analisis jaringan komunikasi, posisi masing-masing aktor diukur berdasarkan ukuran sentralitas (*centrality*), sehingga diketahui siapa aktor yang paling

menonjol dan paling menentukan dalam keseluruhan jaringan (*complete network*) (Hansen et al., 2020).

Empat ukuran sentralitas tersebut antara lain, 1) sentralitas tingkatan (*degree centrality*), 2) sentralitas kedekatan (*closeness centrality*), 3) sentralitas keperantaraan (*betweenness centrality*), dan 4) Sentralitas Eigenvektor (*eigenvektor centrality*) (Borgatti et al., 2002)

Sebagaimana disampaikan dalam sub bab metode, proses menganalisis jaringan komunikasi ini akan menggunakan bantuan perangkat lunak UCINET 64, yang dilakukan dengan cara menganalisis hasil tabulasi hubungan antar *stakeholder*. Tabulasi hubungan antar *stakeholder* tersebut disampaikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Hubungan antar *stakeholder* terkait keberadaan PKL di jalan barito 1

Stakeholder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
4	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0
5	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0
6	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
10	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Kemendag
2. Kemkop UMKM
3. Kemenaker
4. Dinkop UMKM
5. Din tata kota
6. PKL
7. Ormas
8. Pedagang formal
9. Pemilik lahan
10. Pol pp
11. Konsumen

Pada tabel 2, kolom paling kiri dan baris paling atas merupakan huruf-huruf

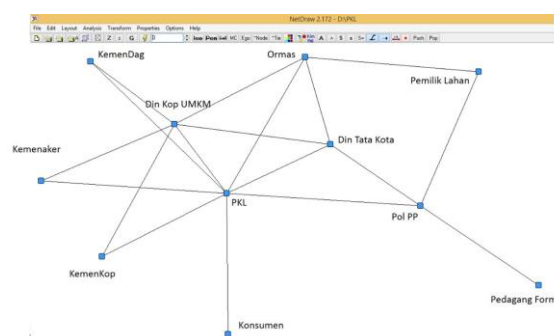
yang mewakili ke-11 *stakeholder*. Kemudian antara satu *stakeholder* dengan *stakeholder* lain diidentifikasi, apakah mereka memiliki hubungan komunikasi atau tidak. Jawaban ya dan tidak tersebut diperoleh berdasarkan hasil identifikasi satu per satu *stakeholder*.

Nilai 1 diisi jika diketahui bahwa misalnya *stakeholder* A dan *stakeholder* B memiliki hubungan komunikasi yang berkaitan terkait keberadaan PKL di jalan barito 1. Misalnya kementerian perdagangan memiliki hubungan komunikasi dengan PKL. Sedangkan nilai 0 diisi kedalam tabel jika misalnya antara *stakeholder* A dengan *stakeholder* B ternyata tidak memiliki hubungan komunikasi. Seperti contohnya, dinas tata kota tidak memiliki hubungan dengan organisasi masyarakat setempat.

Setelah identifikasi selesai dilaksanakan dan semua kotak terisi, maka dilakukan analisis dengan perangkat lunak UCINET 64 untuk melakukan olah data yang hasilnya sebagai berikut:

1. Visualisasi *network metrics*.

Sebagai langkah awal, pertama-tama peneliti menggunakan perangkat lunak netdraw untuk memvisualisasikan *Network Metrics* antar *stakeholder* sebagai berikut.



Gambar 2
visualisasi *network metrics* antar *Stakeholder* terkait keberadaan PKL di jalan barito dengan netdraw UCINET

Hasil visualisasi data interaksi jaringan stakeholder terkait keberadaan PKL di jalan barito dengan menggunakan perangkat *software* netdraw, menunjukkan bahwa bentuk sebaran *node* masih terpecah-pecah, dan belum memusat, yang mengindikasikan bahwa pola interaksi antar *stakeholder* belum sepenuhnya terhubung dan masih terpecah-pecah ke dalam sub-sub jaringan. Belum terhubung dan terpecah-pecahnya pola interaksi antar *node*, dapat menyebabkan aliran komunikasi tidak lancar dan informasi yang penting tidak tersampaikan kepada pihak yang membutuhkan.

Dengan menimbang hasil visualisasi *sociogram*, maka sepertinya aktor-aktor yang merupakan pusat dari *sociogram* tersebut adalah PKL dan dinas koperasi dan UMKM kota DKI Jakarta. Namun untuk membangun suatu kerangka kelembagaan yang efektif, maka pola interaksi yang masih terpecah-pecah harus disatukan.

Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pemerintah kota DKI Jakarta sebagai pihak yang secara formal memiliki kewajiban dalam pemberdayaan PKL untuk mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif.

2. Sentralitas antar *stakeholder*. Hal penting kedua dalam penggunaan UCINET dalam menganalisis hubungan antar *stakeholder* adalah menganalisis *stakeholder* mana yang memiliki peran paling besar dalam hubungan antar *stakeholder* PKL. Dengan didasarkan kepada olah data UCINET, diketahui bahwa hasil olah datanya adalah sebagai berikut.

Tabel 3
Nilai-nilai sentralitas dari 11
***stakeholder* dalam hubungan PKL**

No	Stakeholder	Degree	nDegree	Closeness	Betweenness	Eigen vector
1	Kemendag	2.000	0.182	0.250	3.000	0.229
2	KemKop UMKM	2.000	0.182	0.458	3.000	0.229
3	Kemenaker	2.000	0.182	0.458	3.000	0.229
4	DinKop UMKM	6.000	0.545	0.458	13.000	0.229
5	Din Tata Kota	4.000	0.364	0.579	7.333	0.452
6	PKL	8.000	0.727	0.524	26.167	0.524
7	Ormas	4.000	0.364	0.688	9.333	0.349
8	Pedagang Formal	1.000	0.091	0.550	2.000	0.257
9	Pemilik Lahan	2.000	0.182	0.379	3.500	0.060
10	Pol PP	4.000	0.364	0.423	6.167	0.142
11	Konsumen	1.000	0.091	0.550	6.167	0.371

- a. Sentralitas Tingkatan (*Degree of Centrality*), merupakan analisis yang memperlihatkan popularitas aktor didalam jaringan komunikasi. Dalam jaringan aktor yang berkepentingan terhadap keberadaan PKL, aktor dengan sentralitas tertinggi adalah PKL dengan jumlah hubungan sebanyak 8 link, dan nilai *ndegree* sebesar 0,727. Nilai ini menunjukkan bahwa PKL merupakan pihak yang berhubungan paling banyak dengan seluruh *stakeholder* lainnya. *Stakeholder* kedua yang memiliki dikenal adalah dinas koperasi dan UMKM provinsi DKI Jakarta,
- b. Sentralitas kedekatan (*Closeness Centrality*), merupakan analisis yang menggambarkan seberapa dekat *stakeholder* (*node*) dengan seluruh *stakeholder* lain didalam jaringan. Kedekatan diukur dengan dari berapa (Rosita & KURNIATI, 2006) langkah (*jalur/path*) seorang aktor dapat menghubungi atau dihubungi oleh aktor lain dalam jaringan (Hansen, Derek L. et.al, 2020).

Semakin rendah nilai kedekatan, akan semakin baik karena memperlihatkan jarak yang rendah setiap aktor untuk berhubungan dengan aktor lain. Aktor yang memiliki tingkat kedekatan terbaik adalah PKL yang sebagian besar hanya membutuhkan 1 langkah untuk menghubungi sebagian besar aktor lain.

Sementara aktor dengan kedekatan terburuk adalah konsumen dan juga pedagang formal, karena para *stakeholder* ini memang tidak pernah atau jarang sekali dilibatkan dalam diskusi terkait pemberdayaan PKL di jalan barito 1, sehingga hampir tidak pernah bertemu dan bertatap muka dengan para *stakeholder* lain dalam jaringan.

- c. Sentralitas *keperantaraan* (*betweenness centrality*), merupakan sentralitas yang memperlihatkan posisi aktor sebagai perantara (*betweenness*) dari hubungan aktor satu dengan aktor lain dalam jaringan. Apakah suatu aktor (*node*) untuk menghubungi aktor lain dapat langsung berhubungan atau harus melalui aktor tertentu.

Hasil analisis dalam tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai sentralitas *keperantaraan* untuk jaringan komunikasi PKL barito yang terbesar adalah PKL dengan nilai 26.167, sedangkan *stakeholder* kedua terbesar adalah dinas koperasi dan UMKM kota DKI jakarta yakni 13,000. Menurut (Prell, 2012) sentralitas *keperantaraan* penting untuk diamati karena berkaitan dengan kontrol dan manipulasi informasi. Dengan demikian dinas koperasi

dan UMKM kota DKI jakarta harus membangun suatu bentuk kepercayaan mutual dengan PKL sehingga informasi yang beredar selalu sama dan akurat.

- d. Sentralitas *eigenvektor* (*eigenvector centrality*), merupakan analisis sentralitas yang dapat melihat seberapa penting posisi seorang *stakeholder* dalam suatu jaringan. Nilai seberapa penting ini digambarkan sebagai seberapa banyak jaringan yang dipunyai oleh orang/organisasi/institusi yang mempunyai relasi dengan aktor (Hansen et al., 2020). Aktor yang memiliki nilai sentralitas *eigenvektor* tertinggi adalah PKL dengan nilai 0,524. Nilai *eigenvektor* tertinggi menunjukkan bahwa *stakeholder* tersebut memiliki pengaruh penting dalam jaringannya.

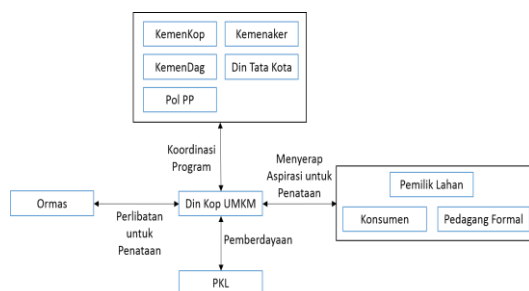
Dari hasil analisis *stakeholder* berdasarkan sentralitas, diketahui bahwa PKL merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh yang terbesar dalam jaringan keberadaan PKL di kota DKI jakarta. PKL menempati empat posisi sentralitas yaitu tingkatan, kedekatan, *keperantaraan*, dan *eigenvektor*. Hal ini sepertinya tercipta karena PKL dihubungi secara langsung oleh berbagai kementerian, dan juga berhubungan langsung dengan para *stakeholder* di lapangan lainnya seperti ormas, polisi pamong praja, hingga konsumen.

Namun sebagai sebuah objek pemberdayaan, mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan perkotaan, sehingga PKL justru harus dibantu oleh wakil pemerintah sekaligus *stakeholder* kedua yang berdasarkan analisis, memiliki sentralitas

tertinggi kedua, yaitu dinas koperasi dan UMKM.

Dinas koperasi dan UMKM harus mengambil posisi utama dalam tata kelola kelembagaan pemberdayaan PKL. Dinas koperasi dan UMKM harus berada ditengah, menghubungkan koordinasi antar kementerian dan instansi di tingkat kota DKI Jakarta lainnya, hingga menyerap perspektif konsumen dan pedagang formal.

Dengan demikian kerangka kelembagaan yang perlu dibentuk dalam jaringan tata kelola kelembagaan pemberdayaan PKL barito harus bersifat memusat (*interlock personal network*), dengan dinas koperasi dan UMKM mengambil peran yang dominan dari salah satu aktor dalam jaringan komunikasi tersebut.



Gambar 3
Bentuk tata kelola kelembagaan jaringan keberadaan PKL barito

Sebagaimana tergambar pada gambar 3. Dinas koperasi dan UMKM DKI Jakarta harus berperan sebagai jembatan antara kebijakan (kementerian/lembaga) dengan objek kebijakan (PKL), juga dengan para mitra (ormas) dan juga para pihak yang terlibat lainnya (pemilik lahan, konsumen, dan pedagang formal).

Dengan demikian PKL dapat menerima program bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dan fokus kepada upaya-upaya mengembangkan usahanya agar dapat menjadi lebih sejahtera.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, PKL merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh terbesar dalam kedekatan hubungan antar *stakeholder*. Namun sebagai objek kebijakan, maka *stakeholder* dengan pengaruh terbesar kedua harus mengambil peran sebagai jembatan antar *stakeholder*. *stakeholder* ini adalah dinas koperasi dan UMKM DKI Jakarta yang dapat mengambil peran sentral dalam upaya tata kelola kelembagaan PKL di jalan barito. Dengan peran sentral pada dinas koperasi dan UMKM DKI Jakarta, maka dinas koperasi dan UMKM DKI Jakarta dapat lebih kuat dalam mengelola program dari pusat dan daerah, lebih mudah dalam membina koordinasi dengan ormas, dan juga dapat fokus memenuhi aspirasi konsumen, pemilik lahan, dan juga pedagang formal yang terimbas keberadaan PKL. Sehingga PKL dapat fokus dalam menjalankan usaha mereka tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan perkotaan DKI Jakarta.

Bibliografi

- Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Freeman, L. C. (2002). Ucinet for Windows: Software for social network analysis. *Harvard, MA: Analytic Technologies*, 6.
- Debrah, Y. A. (2007). Promoting the informal sector as a source of gainful employment in developing countries: insights from Ghana. *The International Journal of Human Resource Management*, 18(6), 1063–1084.
- Economy, O. (2019). *Tackling Vulnerability in the Informal Economy*.
- Hansen, D. L., Shneiderman, B., Smith, M. A., & Himelboim, I. (2020). Social network analysis: measuring, mapping, and modeling collections of connections. *Analyzing Social Media Networks with NodeXL: Insights from a*

- Connected World. Elsevier Inc, Burlington*, 31–52.
- Ko Ko, T., Dickson-Gomez, J., Yasmeen, G., Han, W. W., Quinn, K., Beyer, K., & Glasman, L. (2020). Informal workplaces and their comparative effects on the health of street vendors and home-based garment workers in Yangon, Myanmar: a qualitative study. *BMC Public Health*, 20, 1–14.
- Latour, B. (1996). On actor-network theory: A few clarifications. *Soziale Welt*, 369–381.
- Mbudja, A. P., Walujo, D. A., & Sugito, S. (2019). Efektivitas hasil belajar IPS melalui penggunaan model pembelajaran snowball throwing pada siswa kelas IV SDN Ende 5 dan SDI Ende 10. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, 9(2), 82–90.
- Merina, N. (2016). Pengertian UKM & UMKM? Bagaimana Usaha Kecil Menengah di Indonesia. *GOukm. Id*.
- Missonier, S., & Loufrani-Fedida, S. (2014). Stakeholder analysis and engagement in projects: From stakeholder relational perspective to stakeholder relational ontology. *International Journal of Project Management*, 32(7), 1108–1122.
- Prell, C. (2012). *Social network analysis: History, theory and methodology*. Sage.
- Rahardyan, Aziz & Fitriani, F. F. (2019). *Buah Simalakama Penataan Pedagang Kaki Lima Ibu Kota*.
- Rosita, P., & KURNIATI, R. (2006). *Kajian Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Beraktivitas dan Memilih Lokasi Berdagang di Kawasan Perkantoran Kota Semarang (Wilayah Studi: Jalan Pahlawan-Kusumawardhani-Menteri Soepeno)*. Universitas Diponegoro.
- Sudaryono, M. A., Rustiyarso, R., & Salim, I. (2018). Analisis Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Kriteria Ketuntasan Minimal dalam Pembelajaran Sosiologi Siswa Kelas Xii IIS. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(3).
- Walsh, J. (2010). Street vendors and the dynamics of the informal economy: Evidence from Vung Tau, Vietnam. *Asian Social Science*, 6(11), 159–165.
- Yatmo, Y. A. (2008). Street vendors as ‘out of place’ urban elements. *Journal of Urban Design*, 13(3), 387–402.
- Zaenab, S. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Perspektif Kekinian*. Malang: Selaras.

Copyright holder :

Elisabeth Ratu Rante Allo, Auderey Tangkudung dan Adipati Rahmat Gumelar (2021).

First publication right :

Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

